

POTENSI PENGEMBANGAN PERBENIHAN PADI DI JAWA BARAT BERDASARKAN ANALISIS SWOT

Iskandar Ishaq

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Jalan Kayuambon No. 80 Lembang 40391
Telp.: (022) 2786238; HP.: 0818 437 637

ABSTRACT

Possibility of SWOT Method to Analyze the Potential of Rice Seed Development in West Java. One of the main factors determining rice production was the use of quality rice seeds. It was estimated that the need of quality rice seeds in West Java was approximately 45,078.19 t/year and 3,674.11 t/year for irrigated lowland and upland rice, respectively. Ironically the utilization of certified seeds was only 31.36% of the above mentioned predicted demand. Various problems related to this condition might arise since the process of seed production, the distribution, and the spread of the seeds, as well as the organization of the seed growers themselves. Based on these issues, it might be useful to apply the SWOT analysis method to identify problems and opportunity, as well as to identify strategies to solve the identified problems in the quality of rice seed development in West Java. Results of the study indicated that the development of the quality rice seeds in West Java can be achieved through a well consideration of four strategies, namely (1) strength-opportunity/SO strategy is aggressive, (2) strength-threat/ST strategy is consolidation, (3) weakness-opportunity/WO strategy is diversification, and (4) weakness-threat/WT strategy is defensive. The policies needed to achieve the target increase of rice seed development, such as (1) performance improvement, planning, supervision, and consistency in the implementation of government policy (intensification) is mainly associated with rice seed development oriented agribusiness, (2) increase coordination among relevant agencies in developing rice seed and the involvement of private sector through partnership with farmers, (3) increase production efficiency and quality of rice seeds during the next five years with growth of 10–20% or 2–4% per year, and (4) increased household income farmers, rice seed breeder with a 100–150% or 20–25% growth per year.

Key words: *Rice, seed, institutional, SWOT, strategy.*

ABSTRAK

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap upaya untuk meningkatkan ketersediaan beras adalah benih bermutu varietas unggul yang ditanam dalam skala luas. Potensi kebutuhan benih padi bermutu di Jawa Barat diperkirakan mencapai 45.078,19 t/tahun dan 3.674,11 t/tahun berturut-turut untuk lahan sawah dan lahan kering, tetapi penggunaan benih hanya 31,36% dari perkiraan kebutuhan tersebut. Berbagai kendala yang berkaitan dengan kondisi ini, diperkirakan muncul dalam proses produksi itu sendiri, sejak proses produksi benih sumber, proses penyaluran benih sebar, sampai kapasitas kelembagaan petani penangkar benih. Berdasarkan kondisi itu, maka dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, serta strategi mengatasi berbagai kendala yang teridentifikasi. Hasil kajian menunjukkan, bahwa pengembangan perbenihan padi di Jawa Barat dapat ditempuh melalui empat strategi, yaitu (1) strategi kekuatan-peluang/SO bersifat agresif, (2) strategi kekuatan-ancaman/ST bersifat konsolidatif, (3) strategi kelemahan-peluang/WO bersifat diversifikatif, dan (4) strategi kelemahan-ancaman/WT bersifat defensif. Kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran peningkatan pengembangan perbenihan padi, yaitu (1) peningkatan kinerja, perencanaan, pengawasan, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan Pemda (program intensifikasi) terutama yang berkaitan dengan pengembangan perbenihan padi yang berorientasi agribisnis, (2) peningkatan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengembangan perbenihan padi dan keterlibatan swasta melalui kemitraan dengan petani, (3) peningkatan efisiensi produksi dan mutu benih padi selama lima tahun kedepan 10–20% atau dengan pertumbuhan 2–4% per tahun, dan (4) peningkatan pendapatan rumah tangga petani penangkar benih padi 100–150% atau dengan pertumbuhan 20–25% per tahun.

Kata kunci: Padi, benih, kelembagaan, SWOT, strategi.

PENDAHULUAN

Benih berkualitas tinggi atau benih bermutu adalah benih yang murni secara genetik sebagai pembawa potensi genetik suatu varietas, matang secara fisiologis, dan memenuhi persyaratan mutu fisik berdasarkan prosedur pengujian untuk mendapatkan sertifikat (sertifikasi). Dalam sertifikasi benih, maka prosedur yang harus dilalui diantaranya pemeriksaan lapangan, pemeriksaan gudang, dan peralatan, pengawasan terhadap benih yang sedang diolah serta pemeriksaan laboratorium. Karakteristik yang mencerminkan mutu benih antara lain asli (*genuine, authentic*), mencerminkan karakteristik

varietas yang diwakilinya, murni (tidak tercampur *off-types*), bersih dari kotoran (biji, gulma, tanaman lain, *inert matter*, *immature seed*), bernas, hidup (*viable*, tumbuh bila ditanam) dan sehat (tidak mengandung penyakit) (Samaullah dan Wahyuni 2006). Untuk maksud di atas, maka produksi benih sumber didasarkan pada pedoman umum pengelolaan benih sumber tanaman sebagaimana tertuang di dalam SK Kepala Badan Litbang Pertanian No. OT.210.69.2003 (Suryana 2007).

Kontribusi varietas unggul terhadap peningkatan produksi padi telah terbukti sangat signifikan melalui keberhasilan pencapaian swasembada beras tahun 1984. Dampak varietas unggul terhadap peningkatan produksi dan kualitas produk hanya akan terasa bila varietas tersebut ditanam dalam skala luas yang ditentukan antara lain oleh kemampuan industri benih untuk mendistribusikan benih bermutu (pembawa potensi genetik) sampai ke petani secara efektif dan efisien (Nugraha dan Sayaka 2004). Lebih jauh, Weimortz (1985) menyatakan bahwa tanpa sertifikasi sebagai sarana yang mampu menjamin keaslian varietas, maka keunggulan varietas baru yang dikembangkan oleh para pemulia tanaman (*breeders*) tidak akan dinikmati oleh petani.

Di Jawa Barat penggunaan benih padi bermutu atau bersertifikat oleh petani padi masih relatif rendah yaitu 31,47%, walaupun penyebaran dan adopsi padi varietas unggul telah mencapai 96,2% dari seluruh luas lahan produksi padi (Bachrein dan Ishaq 2007). Untuk meningkatkan ketersediaan benih serta peningkatan penggunaan benih bermutu tersebut, maka salah satunya dilakukan melalui kegiatan produksi Benih Sumber Padi bersamaan dengan pembentukan dan penguatan kapasitas UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber) sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Badan Litbang Pertanian No.OT.130.95.2003 tentang pembentukan kelembagaan internal pada Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Litbang Pertanian, sebagai sarana penyediaan benih sumber dan peningkatan distribusi varietas unggul baru yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian.

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi serta peran UPBS, BPTP Jawa Barat itu, maka dilakukan kegiatan awal berupa survei identifikasi serta karakterisasi sistem kelembagaan perbenihan di Jawa Barat yang bertujuan mengetahui potensi, masalah, kendala, dan peluang dalam peningkatan produksi padi di Jawa Barat, dan mengetahui potensi dan peluang pengembangan usaha benih padi di Jawa Barat, serta merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan perbenihan padi di Jawa Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan survei dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Bekasi dan Subang. Penelitian dilaksanakan bulan Januari–Mei 2007.

Metode penelitian dilakukan berdasarkan pemahaman pedesaan secara partisipatif/*participatory rural appraisal* didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) di masing-masing kabupaten (Bandung, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Bekasi, dan Subang) dan koordinasi dengan PT Shang Hyang Seri (SHS) di Kabupaten Subang serta dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan (lahan sawah petani dan unit prosesing benih). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *desk study*, wawancara, diskusi, curah pendapat, observasi langsung, dan pencatatan terhadap beberapa responden, diantaranya petugas pertanian, aparatur pemerintahan desa, petani, dan penangkar benih yang dijumpai di lapangan.

Analisis data dilakukan berdasarkan analisis SWOT terbagi ke dalam analisis faktor internal (*strength* dan *weakness*) dan faktor eksternal (*opportunity* dan *threat*). Dari masing-masing faktor internal dan eksternal kemudian dievaluasi tingkat urgensitasnya untuk menentukan bobot faktor (BF) masing-masing faktor. Analisis dilanjutkan dengan menentukan nilai dukungan (ND) masing-masing faktor dengan menggunakan skala 1–5. Perkalian BF X ND merupakan nilai skor dari masing-masing faktor. Penentuan BF dan ND dilaksanakan oleh beberapa orang pakar yang terdiri atas ahli ekonomi pertanian, agronomi, tanah, pemuliaan, hama dan penyakit, ahli sosial, dan unsur perencanaan serta kebijakan pembangunan pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Lahan dan Kendala Pengembangan Produksi Padi di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi padi. Hal itu ditunjukkan dengan potensi luas lahan baku yang dapat ditanami padi cukup luas, yaitu 3.607.534 ha (100%) terbagi ke dalam lahan sawah seluas 925.900 ha (25,67%) dan lahan kering seluas 2.681.634 ha (74,33%). Namun demikian, potensi lahan yang dapat ditanami padi dibatasi oleh faktor ketersediaan air irigasi bagi potensi pertumbuhan maksimum tanaman padi. Dari lahan sawah seluas 925.900 ha (25,67% dari total luas lahan di Jawa Barat) berdasarkan ketersediaan air irigasi, maka dapat digolongkan ke dalam (a) pengairan teknis 380.996 ha, (b) pengairan setengah teknis 116.443 ha, (c) pengairan sederhana 92.543 ha, (d) pengairan pedesaan 158.304 ha, (e) tadah hujan 174.060 ha, dan (f) pasang surut 46 ha, lebak 567 ha, dan polder lainnya 2.941 ha (Tabel 1) (Diperta Provinsi Jawa Barat 2007).

Walaupun potensi luas lahan yang dapat ditanami tanaman padi di Jawa Barat masih cukup luas, tetapi dalam kenyataannya menghadapi berbagai

masalah dan kendala (Ishaq 2007), diantaranya: (a) pada lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis, terutama pada daerah yang termasuk kedalam golongan air III dan IV terjadi penurunan debit air yang masuk ke dalam lahan sawah, baik yang diakibatkan penurunan debit air (penyusutan) dari sumber irigasi (waduk) itu sendiri maupun adanya kerusakan fisik dan kurang optimumnya fungsi jaringan irigasi teknis (jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan saluran). Dengan demikian pada daerah golongan III dan IV sering terjadi defisit air, sehingga terjadi kemunduran waktu tanam bahkan sampai terjadi kegagalan panen, dan (b) pada lahan sawah tadah hujan dan/atau lahan kering lebih dipengaruhi oleh ketidakpastian musim (kemunduran musim hujan) sebagai akibat pengaruh kondisi iklim global (El-Nino dan La-Nina), sehingga juga akan berdampak kurang baik terhadap tingkat produksi dan produktivitas tanaman padi, seperti kemunduran waktu tanam, kekeringan, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang akan bermuara kepada penurunan hasil, produksi bahkan sampai terjadi kegagalan panen (puso).

Produksi padi di Jawa Barat sampai dengan saat ini masih didominasi oleh tanaman padi yang berasal dari lahan sawah (padi sawah) dengan kontribusi >96% dibandingkan dengan kontribusi produksi padi gogo (<4%). Produksi padi sawah rata-rata selama 6 tahun terakhir (tahun 2001–2006) adalah 9.013.213,833 t/th dari hasil luas panen 1.693.351,833 ha/th (produktivitas hasil 5,32 t/ha GKG, sedangkan produksi padi gogo rata-rata selama kurun waktu yang sama adalah 318.402,33 t/th yang berasal dari luas panen rata-rata per tahun 122.643,57 ha/th (produktivitas rata-rata 2,60 t/ha GKG) (BPS 2002; BPS 2003; BPS 2004; BPS 2005; Diperta provinsi Jawa Barat 2006; Diperta provinsi Jawa Barat 2007).

Tabel 1. Luas lahan sawah untuk pertanaman padi berdasarkan klasifikasi ketersediaan air dan waktu tanam di Jawa Barat, 2007

Klasifikasi lahan sawah	Luas baku lahan (ha)			Jumlah baku lahan (ha)
	>2 kali tanam	1 kali tanam	Sementara tidak ditanami	
Irigasi teknis	376.108	4.837	51	380.996
Irigasi ½ teknis	109.678	6.755	10	116.443
Irigasi sederhana	83.430	9.108	5	92.543
Irigasi pedesaan	143.886	14.339	79	158.304
Tadah hujan	70.859	102.928	273	174.060
Lebak, pasang surut, dll	1.868	120	1.566	3.554
Jumlah baku lahan	785.829	138.087	1.984	925.900

Sumber: Data diadaptasikan dari hasil pemaparan dalam Pertemuan Koordinasi P2BN Posko, II pada tanggal 12 April 2007 di Dinas Pertanian provinsi Jawa Barat (2007).

Tabel 2. Persentase produksi benih padi berdasarkan varietas unggul yang ditanam di Jawa Barat, MT 2006

Varietas	MH		MK		Rata-rata (%)
	Luas (ha)	Persen (%)	Luas (ha)	Persen (%)	
Ciherang	2.608	60,0	3.677	64,4	62,2
IR64	979	22,5	984	17,2	19,9
Cigeulis	155	3,6	311	5,5	4,6
Widas	154	3,5	62	1,1	2,3
IR42	118	2,7	108	1,9	2,3
Cilamaya Muncul	80	1,8	69	1,2	1,5
Situ Bagendit	14	0,3	158	2,8	1,6
Dyah Suci	63	1,5	42	0,7	1,9
Sintanur	20	0,5	60	1,1	0,8
Lain-lain ¹	152	3,6	235	4,1	3,9
Jumlah	4.343	100,0	5.706	100,0	100,0

Keterangan: ¹Meliputi varietas: Lusi, Cibogo, Mekongga, Gilirang, Tukad Unda, Membramo, Ciliwung, Way Apo Buru (WAB), Pandanwangi, Bondoyudo, Towuti, dan Sarinah.

Berdasarkan kondisi di atas, kelompok petani-penangkar mempunyai peluang untuk dikembangkan secara luas dengan orientasi agribisnis. Keberadaan penangkar benih tersebut adalah sebagai kelembagaan benih yang melayani komunitas petani sekitarnya untuk dapat menyediakan benih secara tepat waktu, jumlah dan kualitas, serta relatif murah dan terjangkau oleh sebagian besar petani kecil. Sesuai dengan penyebaran varietas unggul di Jawa Barat, varietas padi yang banyak diproduksi berturut-turut adalah varietas Ciherang (62,2%), IR64 (19,9%), Cigeulis (4,6%), Widas dan IR42 masing-masing 2,3% (Tabel 2).

Kelembagaan Penangkaran Benih Padi di Jawa Barat

Penangkaran benih padi terdapat di semua kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh kelompok petani-penangkar, baik yang tergabung ke dalam Ikatan Penangkar dan Pedagang Benih (IPPB) di masing-masing kabupaten/kota, maupun petani penangkar yang tidak tergabung ke dalam organisasi tersebut. Setiap kelompok petani-penangkar bekerjasama dengan UPTD Benih kabupaten dengan nama dan status institusi yang beragam (Balai Pengawasan

dan Sertifikasi Benih/BPSB kabupaten atau Instalasi Prosesing Benih Padi dan Palawija/IPBPP kabupaten atau UPTD Balai Benih Induk/BBI atau unit kerja lainnya yang sejenis), sebagai unit yang melaksanakan kegiatan prosesing benih (Tabel 3).

Tabel 3. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) berikut Wilayah Kerjanya, 2007

BPSB	Wilayah Kabupaten
Garut	Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar
Majalengka	Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Cirebon
Cianjur	Bandung, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi
Karawang	Kerawang, Bekasi, dan Purwakarta
Subang	Subang, dan Indramayu

Sistem kerja sama antara kelompok petani-penangkar dengan UPTD benih kabupaten adalah saling menguntungkan, yaitu petani mendapat pinjaman modal untuk persiapan lahan dan sarana produksi (benih sumber, pupuk, dan pestisida) yang dikembalikan setelah panen (*yarnen*) serta melaksanakan proses produksi (persiapan lahan hingga panen). Manajemen pemeliharaan yang utama adalah melakukan pembuangan tanaman padi tipe simpang (*off type/roguing*) yang seharusnya dilaksanakan pada fase vegetatif, fase berbunga, dan menjelang panen, tetapi pada kenyataannya petani penangkar hanya melakukan 1 sampai 2 kali, yaitu pada saat menjelang panen dan/atau pada saat berbunga dan menjelang panen, dengan bimbingan pihak UPTD Benih. Selanjutnya, hasil panen dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dibeli oleh UPTD dengan harga lebih tinggi sekitar 5% dari harga benih konsumsi di pasaran, yang kemudian diolah menjadi benih.

Sebagian besar produk benih bermutu (90–100%) yang dihasilkan di setiap kabupaten dipasarkan di kabupaten masing-masing, kecuali Kabupaten Banjar dan Karawang masing-masing 48% dan 50% dari total produksi benih. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan kelompok petani-penangkar benih masih sangat tinggi di seluruh kabupaten di Jawa Barat, meskipun masih memerlukan dukungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terutama melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada kelompok petani-penangkar.

Peran Dinas Pertanian adalah memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, sedangkan peran BPSBTPH provinsi (dikoordinasikan dengan UPTD Benih Kabupaten) adalah pengawasan dan sertifikasi, dan peran UPTD benih kabupaten adalah melaksanakan sebagian proses produksi benih, terutama penanganan pascapanen, yaitu pengangkutan, pengeringan, sortasi/*blowering*, pengujian, pengemasan/*packaging*, pencantuman label/*labeling*, dan distribusi

pemasaran. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD benih umumnya memadai, yaitu (1) lantai jemur, (2) *dryer* otomatis dengan kapasitas 10 t/8jam, (3) *dryer* konvensional dengan kapasitas 2,5–5 t/10 jam, (4) *Moister tester*, (5) *plastic sealer*, (6) traktor, dan (7) mobil angkut.

Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa usahatani penangkaran benih padi memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani bertujuan menghasilkan gabah konsumsi. Pendapatan bersih rata-rata yang diterima oleh petani penangkar, dengan rata-rata produktivitas 5,1 t/ha (3,5 ton untuk benih dan 1,6 ton untuk konsumsi), adalah Rp. 7,32 juta dengan B/C rasio 1,61. Sedangkan rata-rata pendapatan bersih petani dan B/C rasio untuk padi/gabah sebagai konsumsi dengan produktivitas yang relatif sama masing-masing adalah Rp. 2,4 juta dan B/C rasio 1,04.

Pendapatan petani penangkar benih masih mempunyai peluang yang tinggi untuk ditingkatkan, karena hingga saat ini ternyata efisiensi produksi benih bersertifikat di tingkat kelompok petani-penangkar masih rendah, yaitu sekitar 49,0% dari total produksi setiap hektarnya. Rendahnya efisiensi produksi tersebut disebabkan, antara lain rendahnya produktivitas calon benih (*pre-cleaned seed*) per ha, rendahnya tingkat kelulusan inspeksi lapangan dan uji laboratorium, pembatalan kontrak secara sepihak oleh petani karena kesepakatan harga calon benih tidak menarik, penjualan calon benih sebagai konsumsi, dan pengendalian mutu eksternal dan internal yang masih relatif lemah. Lembaga pendukung subsistem produksi (*eg.* BBI dan BBU) dan pendukung jaminan mutu (*eg.* BPSB) belum dilengkapi sumberdaya yang memadai untuk mendukung sistem perbenihan komersial dengan jaminan mutu.

Perkembangan kelompok petani-penangkar benih padi di Jawa Barat hingga saat ini, khususnya kelompok mandiri, ternyata sangat lambat dibandingkan dengan kelompok yang bermitra dengan PT SHS atau PT Pertamina. Hal ini ditunjukkan, antara lain (1) produksi benih sebar dari kelompok yang bermitra umumnya meningkat, sedangkan kelompok mandiri cenderung tetap dan atau menurun dari tahun ke tahun di semua kabupaten (di kabupaten Karawang), produksi benih kelompok yang bermitra meningkat dari 100 ton pada tahun 1992 menjadi 2.500 ton pada tahun 2006. Sebaliknya produksi benih kelompok mandiri, pada tahun yang sama, cenderung tetap dengan kisaran 80–115 ton/tahun. Di Kabupaten lain terdapat kecenderungan penurunan produksi benih sebar dari kelompok mandiri, dan (2) jumlah petani penangkar dan luas areal perbenihan dari kelompok mandiri cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir ini di semua kabupaten (*eg.* di kabupaten Cianjur, dari 28 orang anggota kelompok petani “*Oryza sativa*” yang mengelola lahan seluas 49 ha, hingga saat ini 7 orang petani dengan luas lahan hanya 3 ha).

Analisis Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman (*Threat*) (SWOT) Dalam Menentukan Strategi Pengembangan Perbenihan

Strategi pengembangan perbenihan padi di tingkat kelompok petani-penangkar diawali dengan mengidentifikasi isu-isu yang terkait dengan kondisi eksisting kelompok petani-penangkar di Jawa Barat. Dari berbagai isu tersebut kemudian diidentifikasi lebih kurang sepuluh permasalahan yang paling relevan. Masing-masing masalah kemudian di ranking atas dasar indikator prioritas, yaitu *urgent*, *seriousness*, dan *growth*. Masalah yang teridentifikasi selanjutnya dianalisis dengan SWOT yang terdiri atas faktor internal (*strength* dan *weakness*) dan faktor eksternal (*opportunity* dan *threat*). Dari masing-masing faktor internal dan eksternal kemudian dievaluasi tingkat urgensitasnya untuk menentukan bobot faktor (BF) masing-masing faktor. Analisis dilanjutkan dengan menentukan nilai dukungan (ND) masing-masing faktor dengan menggunakan skala 1-5. Perkalian BF X ND merupakan nilai skor dari masing-masing faktor. Penentuan BF dan ND dilaksanakan oleh beberapa orang pakar yang terdiri atas ahli ekonomi pertanian, agronomi, tanah, pemuliaan, hama dan penyakit, ahli sosial, dan unsur perencanaan serta kebijakan pembangunan pertanian.

Dari hasil analisis ini dapat ditentukan prioritas dari masing-masing faktor dalam kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) untuk masing-masing masalah. Dari masing-masing masalah tersebut kemudian disusun strategi pemecahannya yang terdiri atas strategi agresif, diversifikatif, konsolidatif, dan defensif. Analisis SWOT diterapkan dalam mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang dihadapi dalam merencanakan program pengembangan sistem perbenihan padi dan kelembagaannya. Pada prinsipnya analisis SWOT didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki suatu organisasi dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada untuk mencapai suatu tujuan (Sianipar dan Entang 2001). Secara bersamaan, kelemahan dan ancaman ditekan serendah mungkin. Dalam kajian ini, analisis difokuskan pada kinerja program yang diharapkan. Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja suatu program dikelompokkan kedalam faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi, kebijakan, dan program yang terkait dengan masalah organisasi, manajemen dan sistem perbenihan padi di Jawa Barat. Penetapan strategi pengembangan perbenihan dilakukan berdasarkan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal Sistem Perbenihan Padi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Strategi Pengembangan Perbenihan Padi di Jawa Barat

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tanam lahan sawah 1,74 ha. • Sumberdaya air dan iklim sangat mendukung. • Tersedia Kelompok petani-penangkar . • Tersedia teknologi dan saprodi yang memadai. • Agribisnis sebagai salah satu <i>core</i> bisnis Pemda Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi produksi rendah. • Kontinuitas produksi dan preferensi konsumen rendah. • Ketersediaan benih sumber terbatas. • Pengetahuan, sikap dan ketrampilan rendah. • Akses terhadap informasi dan teknologi pascapanen rendah.
PELUANG (OPPORTUNITY)	STRATEGI: SO (Agresif)	STRATEGI: WO (Diversifikatif)
<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan benih bermutu tinggi. • Program pemerintah dalam peningkatan produksi padi. • Ketersediaan benih bermutu rendah. • Peluang peningkatan efisiensi produksi benih tinggi. • Minat investor melalui kemitraan dengan petani tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kebijakan Pemerintah pusat dan daerah yang konsisten akan mampu meningkatkan pengembangan kelompok petani-penangkar berorientasi agribisnis yang lumintu. • Kondisi yang kondusif akan meningkatkan minat investor/pengusaha untuk menanamkan modal dan menjalankan kemitraan dengan petani (kelompok tani/Gapoktan). • Penerapan inovasi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi, kuantitas, mutu, dan kontinuitas produk benih bermutu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan program intensifikasi perbenihan padi melalui pembinaan yang intensif dan dukungan sarana dan prasarana (budidaya, panen, dan pascapanen) yang memadai. • Pemanfaatan pengusaha/ swasta dalam pengembangan agribisnis benih padi melalui kemitraan dengan petani. • Penyediaan/bantuan benih sumber yang sesuai dengan kebutuhan petani. • Pemanfaatan hasil benih dari kelompok petani penangkar untuk mendukung program pemerintah. • Pemberian kredit dan dana talangan.
ANCAMAN (THREAT)	STRATEGI: ST (Konsolidatif)	STRATEGI: WT (Defensif)
<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan harga saprodi yang memberatkan petani. • Kompetisi pemasaran dengan PT SHS. • Kompetisi pemasaran dengan swasta. • Kebijakan perkreditan yang kurang berpihak ke petani. • Globalisasi ekonomi/pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dukungan Pemda yang besar dan dana yang cukup untuk pengembangan kelompok petani-penangkar benih padi. • Pemberian subsidi melalui kredit dengan persyaratan lunak sehingga terjangkau petani. • Penerapan inovasi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk benih bermutu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pasar dan agro-industri perbenihan padi di tingkat pedesaan untuk meningkatkan daya saing produk benih padi. • Pelatihan petani anggota kelompok petani penangkar secara intensif dan berkesinambungan. • Peningkatan akses dan sarana serta prasarana komunikasi/informasi di tingkat kelompok petani-penangkar.

Strategi Pengembangan Perbenihan Padi di Jawa Barat

Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan perbenihan padi di Jawa Barat disajikan pada Tabel 4. Pernyataan strategi pengembangan usaha perbenihan padi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada saat ini terdiri atas 4 kategori, sebagai berikut:

1. Strategi SO (Agresif), yaitu suatu pernyataan strategi yang sifatnya menggunakan kekuatan faktor internal perbenihan padi di tingkat kelompok petani-penangkar di Jawa Barat untuk memanfaatkan peluang yang berasal dari luar.
2. Strategi WO (Diversifikatif), yaitu suatu pernyataan strategi yang sifatnya meniadakan kelemahan yang berasal dari internal perbenihan padi di tingkat kelompok petani-penangkar di Jawa Barat untuk memanfaatkan peluang dari luar.
3. Strategi ST (Konsolidatif), yaitu suatu pernyataan strategi yang sifatnya memanfaatkan kekuatan faktor internal perbenihan padi di tingkat kelompok petani-penangkar untuk mengatasi ancaman dari luar.
4. Strategi WT (Defensif), yaitu suatu pernyataan strategi yang sifatnya meniadakan kelemahan internal perbenihan padi di tingkat kelompok petani-penangkar untuk menghindarkan ancaman dari luar.

Pengembangan Kelembagaan Pendukung Usaha Perbenihan Padi

Pengembangan kelembagaan pendukung sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan khususnya yang terkait dengan pengembangan perbenihan padi di setiap kelompok petani-penangkar. Kegiatan tersebut, antara lain:

Pengembangan kelembagaan perbenihan, yang mencakup (a) pemberdayaan penangkar benih di tingkat petani yang terakreditasi, (b) penyebaran benih unggul bersertifikat, (c) peningkatan sarana lembaga benih (BPSB, BBI, IPPB/GPPB, BPTP Jawa Barat, dll.), dan (d) pengawasan benih.

1. Pengembangan kelembagaan sarana produksi pertanian di daerah penangkaran benih.
2. Pemberdayaan kelompok petani-penangkar untuk lebih berorientasi agribisnis.
3. Pengembangan kelembagaan penyuluhan melalui, antara lain pementapan kelembagaan penyuluhan, menambah jumlah tenaga penyuluh, meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen penyuluh yang terkait dengan usahatani perbenihan padi.

4. Pengembangan kelembagaan pascapanen dan pengolahan benih padi bermutu yang diarahkan, kepada (a) memperkuat kelembagaan yang mendorong tumbuh kembangnya usaha penanganan pascapanen, dan (b) peningkatan nilai tambah hasil panen, baik untuk benih bermutu maupun untuk konsumsi langsung, dan (c) mengembangkan diversifikasi usaha sebagai upaya mengantisipasi kerugian usaha perbenihan.
5. Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan pemasaran yang diarahkan kepada: (a) peningkatan kualitas teknis dan manajemen lembaga pemasaran yang ada, (b) peningkatan daya saing ekonomi benih padi bermutu, dan (c) perbaikan rantai tata niaga pemasaran dan struktur pasar serta pencegahan terjadinya monopsoni/monopoli pasar benih padi bermutu.

BPTP Jawa Barat diharapkan menjadi mediator dan sumber informasi dalam pengembangan varietas-varietas unggul baru. Pengembangan sistem produksi benih sumber yang disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan daerah atau masyarakat diharapkan menjadi salah satu kegiatan dalam pengembangan varietas-varietas unggul baru tersebut. Produksi benih sumber padi meliputi benih dasar dan benih pokok yang dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan BPSB, BBI, dan institusi produsen benih sebar untuk kelancaran produksi dan penyaluran benih sumber.

Dukungan kegiatan nyata juga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kelembagaan dan manajemen secara umum dan khususnya yang terkait dengan pengembangan sistem perbenihan padi. Kegiatan operasional yang perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, antara lain:

1. Peningkatan/pemantapan pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang mengacu pada Sistem Standarisasi Nasional (SSN) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Dalam kaitan ini, pemerintah daerah diharapkan terus mengembangkan penerapan standarisasi terhadap laboratorium benih di daerah dalam aspek peralatan, metode kerja, dan kemampuan petugas pelaksanaannya.
2. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait dalam pengembangan wilayah perbenihan padi di setiap kabupaten.
3. Desentralisasi pengambilan keputusan manajemen dan kelembagaan selama tidak bertentangan dan tumpang tindih dengan keputusan pemerintah pusat.
4. Pemanfaatan produksi benih bermutu dari kelompok petani-penangkar dengan harga bersaing untuk mendukung percepatan peningkatan produksi padi di setiap Kabupaten.
5. Pemberian kredit dengan persyaratan lunak dan terjangkau oleh petani penangkar serta dana talangan yang dikelola oleh kelompok petani-penangkar.

Diseminasi Inovasi Teknologi

Kegiatan diseminasi dan pemasyarakatan penggunaan benih bermutu difokuskan pada kegiatan *display* varietas dan inovasi teknologi usahatani benih terkini, demonstrasi lapang dan temu lapang (*field day*), pembentukan klinik agribisnis, dan penyebarluasan informasi melalui media cetak (liptan, brosur, petunjuk teknis, dan lain-lain) dan media elektronik (internet/web site, koran, radio, TV, CD/DVD). Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan seluruh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan perbenihan padi di Jawa Barat dapat dibagi ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu:

- (1) Strategi SO (Agresif), diantaranya (a) penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang konsisten akan mampu meningkatkan pengembangan kelompok petani-penangkar berorientasi agribisnis yang lumintu, (b) kondisi yang kondusif akan meningkatkan minat investor/pengusaha untuk menanamkan modal dan menjalankan kemitraan dengan petani (kelompok tani/Gapoktan), dan (c) penerapan inovasi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi, kuantitas, mutu, dan kontinuitas produk benih bermutu.
- (2) Strategi ST (Konsolidatif), diantaranya (a) pemanfaatan dukungan Pemda yang besar dan dana yang cukup untuk pengembangan kelompok petani-penangkar benih padi, (b) pemberian subsidi kepada kelompok petani penangkar benih melalui kredit dengan persyaratan lunak sehingga terjangkau, dan (c) penerapan inovasi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk benih bermutu.
- (3) Strategi WO (Diversifikatif), diantaranya (a) penerapan program intensifikasi perbenihan padi melalui pembinaan yang intensif dan dukungan sarana dan prasarana (budidaya, panen, dan pascapanen) yang memadai, (b) pemanfaatan pengusaha/swasta dalam pengembangan agribisnis benih padi melalui kemitraan dengan petani, (c) penyediaan/bantuan benih sumber yang sesuai dengan kebutuhan petani, (d) pemanfaatan hasil benih dari kelompok petani penangkar untuk mendukung program pemerintah, dan (e) pemberian kredit dan dana talangan bagi kelompok untuk membeli segera produksi benih hasil anggota kelompok petani penangkar benih, dan

- (4) Strategi WT (Defensif), diantaranya (a) pengembangan pasar dan agro-industri perbenihan padi di tingkat pedesaan untuk meningkatkan daya saing produk benih padi, (b) pelatihan petani anggota kelompok petani penangkar secara intensif dan berkesinambungan, dan (c) peningkatan akses dan sarana serta prasarana komunikasi/informasi di tingkat kelompok petani-penangkar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada rekan-rekan peneliti dan penyuluh di BPTP Jawa Barat, yakni Dr. Ir. Saeful Bachrein, Ir. Hendi Supriadi, MSi., Ir. Yanto Surdianto, MP., Ir. Titiek Maryati, Msi., Ir. Darmawan, MP., Ir. Olyandriana Dewi, Susi Ramdhaniati, SP., dan Heny Herawati, STP yang telah terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan pengkajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrein, S. dan I. Ishaq. 2007. Strategi pengembangan sistem perbenihan padi di Jawa Barat. *Dalam: Buletin Ristek Balitbangda Vol 1 No. 2 Desember 2007. ISSN 1412-4238.*
- BPS. 2002. Jawa Barat Dalam Angka Tahun 1998. Badan Pusat Statistik. Bandung.
- BPS. 2003. Jawa Barat Dalam Angka Tahun 1998. Badan Pusat Statistik. Bandung.
- BPS. 2004. Jawa Barat Dalam Angka Tahun 1998. Badan Pusat Statistik. Bandung.
- BPS. 2005. Jawa Barat Dalam Angka Tahun 1998. Badan Pusat Statistik. Bandung.
- Dinas Pertanian Jawa Barat. 2006. Laporan Tahun 2005. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Bandung.
- Dinas Pertanian Jawa Barat. 2007. Laporan Tahun 2006. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Bandung.
- Ishaq, I. 2007. Akselerasi program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dengan peningkatan kapasitas penangkar benih padi di Jawa Barat. *Dalam: Buletin Diseminora Vol 04 Tahun 2007. ISSN 1979-2417.*
- Nugraha, U.S. dan B. Sayaka. 2004. Industri dan kelembagaan perbenihan padi. *Dalam: Kasryno et al (Eds.) Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.*

- Puslitbangtan. 2007. Laporan Tahunan 2006 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. 49p.
- Samaullah, M.Y dan S. Wahyuni. 2006. Varietas unggul padi dan sistem perbenihannya. *Dalam: Makalah disampaikan pada Pelatihan Penangkaran Benih Padi Gogo Kecamatan Pakenjeng, 9 Agustus 2006.*
- Samaullah, M.Y. 2006. Prospek dan kiat-kiat komersialisasi benih sumber padi. *Dalam: Lokakarya Jaringan Sistem Produksi Benih Sumber Padi Bermutu, Sukamandi 13–15 Desember 2006.*
- Sianipar, J.P.G. dan H.M. Entang. 2001. Teknik-Teknik Analisis Manajemen. LAN-RI, Jakarta.
- Suryana, A. 2007. Pedoman Umum Produksi Benih Sumber Padi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Weimortz, E.D. 1985. An international View of Seed Certification. *In: M.B. Mc Donald, Jr and W.D. Pardee (Eds.). The Role of Seed Certification in Seed Industry. CSSA Special Publication No. 10: 25–28. CSSA Inc., Wisconsin, USA.*

